

<http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal>

(e-ISSN 2621-0975) (p-ISSN 2622-3856)

IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR

Simunawir Sitoro

Email : simunawir.sitoro@yahoo.com

DOI : 10.35915/cj.v6i1.642

Received : Received : March 1^h, 2022. Revised: March 14th, 2022. Accepted March 18th, 2022

ABSTRACT

This study aims to identify the problems faced and the MSME development strategy carried out by the Government in Bengalon District. For this reason, research was carried out on ten MSMEs with various different business fields.

The results of the study show that the problems faced by SMEs in Bengalon District include the fields of capital, marketing, production and production support technology.

The Government has made various efforts to foster and develop, including through management training, technical production training and the role of companies to obtain development of production facilities and capital. Assistance from non-government institutions such as corporate social responsibility (CSR) programs to six MSMEs in the form of training and additional assistance for production machines and business assistance.

This strategy carried out by the government aims to improve the ability of small entrepreneurs to become strong and independent as well as community empowerment.

Keywords: MSMEs, Strategy, Coaching.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan strategi pengembangan UMKM yang dilakukan Pemerintah di Kecamatan Bengalon. Untuk itu dilakukan penelitian pada sepuluh UMKM dengan berbagai bidang usaha yang berbeda.

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM Kecamatan Bengalon meliputi bidang permodalan, pemasaran, produksi dan teknologi penunjang produksi. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan diantaranya melalui pelatihan manajemen, pelatihan teknis produksi dan peran perusahaan untuk mendapatkan pengembangan sarana produksi serta modal. Bantuan dari lembaga non pemerintah seperti program *corporate social responsibility* (CSR) kepada enam UMKM berupa pelatihan dan bantuan tambahan mesin produksi serta pendampingan usaha.

Strategi yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: *UMKM, Strategi, Pembinaan*

PENDAHULUAN

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting dalam menopang perekonomian. Sebagai motor penggerak aktifitas ekonomi nasional UMKM sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mampu membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan di daerah. Bagi negara yang memiliki income perkapita rendah, perkembangan UMKM menjadi bukti keberhasilan pembangunan (Primiana : 2009).

UMKM ialah aktivitas usaha yang sanggup memperluas serta membagikan kesempatan untuk warga guna pemerataan dan kenaikan pendapatan, mengakselerasi perkembangan ekonomi, sekaligus berfungsi mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang wajib mendapatkan dukungan, proteksi serta pengembangan sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan peranan Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia adalah negara berkembang dimana perekonomiannya masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya beralih ke sektor modern. Dengan menerapkan “*dual-structure*” (struktur ganda) dalam perekonomiannya, Indonesia memberikan peluang yang sama kepada perusahaan besar maupun UMKM untuk sama-sama mengambil peran dalam perekonomian nasional dan daerah sebagai tulang punggung pembangunan. Oleh sebab itu peran pemerintah dalam pengembangan UMKM sangatlah penting agar UMKM di tingkat nasional maupun daerah bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Era Revolusi Industri 4.0 yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi serta kapabilitas inovasi sebagai

bagian dari nilai/pilar daya saing perekonomian daerah maupun nasional (Iwan, 2019).

Kebijakan pengembangan UMKM dan industri kecil secara praktis menjadi perhatian pemerintah Indonesia sudah sejak lama melalui berbagai kegiatan dan program pembangunan. Dalam pelaksanaannya berbagai faktor penghambat dalam pengembangan UMKM membuat “*performance*” UMKM menjadi berbeda antara satu dengan lainnya. Komitmen yang kuat melalui serangkaian kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM menunjukkan besarnya perhatian pemerintah dalam mendukung eksistensi UMKM. Karena UMKM berpotensi dalam pengembangan perekonomian maka pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dengan memberikan dukungan mulai dari tingkat pusat sampai daerah melalui berbagai kebijakan dan program. Hubungan baik antara pemerintah dengan pelaku usaha menjadi tulang punggung peran negara yang efektif dalam pembangunan ekonomi selalu ditingkatkan karena merupakan karakteristik kunci di tengah perubahan jaman yang didorong oleh globalisasi, di mana selera masyarakat mengalami perubahan yang signifikan.

Dukungan pemerintah yang kuat menjadikan UMKM mampu bertahan tengah terpaan gelombang globalisasi melalui kebijakan dan implementasinya secara konsisten, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang dibuktikan melalui penghargaan terhadap para pengrajin dan hasil karyanya melalui UMKM. Industri kecil diberi keleluasaan secara luas untuk menentukan arah perkembangannya, dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kerja sama pemerintah dengan pelaku bisnis ditingkat lokal/didaerah terjalin dengan baik dan lebih bersifat konsultasi dan komunikasi dengan posisi yang relatif lebih seimbang.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2018 bahwa jumlah UKM sebanyak 8.428 UKM yang meningkat sebesar 44% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.858 UKM. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 dari 18 Kecamatan sebanyak 376.111 orang.

Kecamatan Bengalon dengan Ibukota Desa Sepaso dengan luas 3.196,24 km² dan jumlah penduduk 33.609 orang. Memiliki jarak yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten Kutai Timur yaitu sekitar 7,5 Km. Hal ini menjadi potensi yang besar bagi wilayah Kecamatan Bengalon untuk mengembangkan potensi wilayahnya yang berbasis pada pertanian. Dengan memanfaatkan potensi ini, maka perkembangan UMKM di wilayah Kecamatan Bengalon seharusnya lebih berkembang dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang jauh dari ibukota kabupaten.

Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama permodalan, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan rendahnya penguasaan teknologi proses produksi dan informasi pemasaran. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi UMKM di Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur?
2. Apakah strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi UMKM di Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur.
2. Merumuskan strategi dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Berdasarkan definisi UMKM yang telah dikemukakan yang merujuk pada definisi BPS, maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. **Usaha Mikro** adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 5 orang, termasuk anggota keluarga yang berada di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha yang memiliki tenaga kerja kurang 19 orang yang berada di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur..
3. **Usaha Menengah:** adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 10-99 orang yang berada di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Teknik Pengumpulan Data

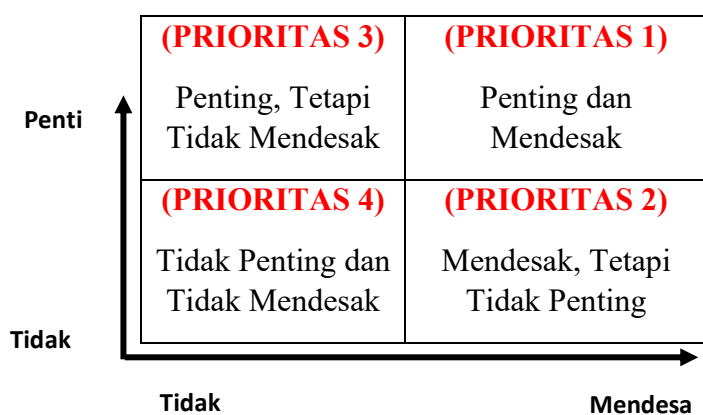
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan antara lain dengan menggunakan metode *Rapid District Appraisal* (RDA) yang meliputi studi kepustakaan (dokumentasi) berupa profil Kecamatan Bengalon, profil desa di Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir, studi

lapangan dan pengamatan/ survei/ observasi, yaitu suatu pendekatan partisipasi untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Secara umum teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penggabungan dari data sekunder dan data primer.

Alat Analisis

a. Metode

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sebanyak sepuluh yang kesemuanya bergerak dalam bidang produksi makanan dalam bentuk catering dan produk makanan ringan yang dijual kepasar. Sembilan UMKM merupakan usaha perseorangan dan hanya satu yang merupakan kumpulan ibu-ibu secara berkelompok dalam bentuk produksi Kerajinan Kreatif Kreasi Sekerat. 90% kepemilikan UMKM di Kecamatan Bengalon adalah perempuan dan hanya satu orang usaha yang dikelola oleh laki-laki.

Analisis data terbagi menjadi aspek kelembagaan, analisis aspek permodalan, analisis aspek pemasaran serta penetapan skala prioritas pengembangan usaha di Kecamatan Bengalon yang dijelaskan secara terperinci.

Analisis Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dianalisis melalui lima kategori yaitu 1) kepemilikan SIUP/ SITU; 2) Kepemilikan NPWP; 3) Keanggotaan dalam Asosiasi Usaha Sejenis; 4) Keaktifan dalam Koperasi; dan 5) Keanggotaan dalam Kadinda Kabupaten Kutai Timur. Kelima kategori ini menentukan urgensi dari pembinaan UMKM di wilayah penelitian.

Hasil analisis kelembagaan menunjukkan bahwa hanya ada dua UMKM yang memiliki SIUP/SITU, empat yang memiliki NPWP, tiga yang menjadi anggota asosiasi, hanya satu yang aktif dalam keanggotaan koperasi dan hanya tiga yang terdaftar sebagai anggota Kadinda Kutai Timur.

Berdasarkan analisis tersebut maka skala prioritas yang perlu pembinaan dalam hal kelembagaan sebanyak enam UMKM yang masuk kategori penting dan mendesak, dua UMKM masuk kategori penting tapi tidak mendesak dan dua UMKM dengan kategori penting untuk dibina tapi tidak mendesak.

Analisis Aspek Produksi

Aspek produksi yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi : 1) Lokasi pembuatan produk; 2) Proses produksi; 3) Jumlah karyawan; dan 4) Jumlah produksi/bulan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh gambaran bahwa mayoritas UMKM melakukan proses produksi di rumah, kecuali usaha Jamur Tiram. Kemudian, proses produksi dilakukan secara manual, kecuali usaha Anis Bakery yang menggunakan peralatan/ mesin. Rata-rata jumlah karyawan pada UMKM sebanyak dua orang, kecuali untuk usaha Pengolahan Ikan Kering, Udang Papai, Terasi Udang berjumlah 11 orang.

Dari empat kategori aspek produksi yang dianalisis dapat diketahui bahwa pengembangan UMKM yang penting dan mendesak diperlukan oleh tujuh UMKM sementara yang penting untuk dibina namun tidak mendesak sebanyak tiga UMKM.

Analisis Aspek Pemasaran

Lima indikator yang dianalisis pada aspek pemasaran meliputi: 1) cakupan daerah pemasaran; 2) Sistem Produksi; 3) Keberadaan usaha sejenis; 4) produk yang dihasilkan sama; dan 5) kepemilikan usaha yang sama.

Terdapat dua UMKM yang pemasarannya hanya pada lingkup kecamatan yang sama, enam UMKM memiliki ruang lingkup pemasaran sampai luar kecamatan dan dua UMKM yang lingkup pemasarannya lokal Kaltim.

Adapun jika dilihat dari sistem produksi, terdapat tiga UMKM yang memproduksi berdasarkan pesanan, kemudian lima UMKM yang sistem produksinya merupakan campuran antara produksi massal dan pesanan dan dua UMKM yang sistem produksinya massal dan kontinyu.

Selanjutnya, jika dilihat dari persaingan usaha dengan produk sejenis, maka terdapat enam UMKM yang memiliki pesaing namun mayoritas terdapat kedekatan secara kekerabatan sehingga dianggap bukan pesaing yang kompetitif sedangkan empat UMKM lainnya tidak memiliki pesaing pada daerah yang sama.

Skala prioritas pengembangan UMKM berdasarkan aspek lingkup pemasaran terdapat dua UMKM yang masuk dalam kategori penting dan mendesak dan delapan UMKM yang menghadapi masalah pemasaran yang penting namun tidak mendesak.

Analisis Aspek Permodalan

Hasil penelitian dilihat dari aspek permodalan dapat dibagi menjadi: 1) nilai total peralatan untuk usaha; 2) jumlah modal usaha; 3) sumber permodalan usaha; 4) jumlah modal sendiri; dan 5) komposisi modal sendiri.

Total modal usaha pada sepuluh UMKM yang menjadi responden berkisar antara 6 juta sampai 188 juta rupiah. Terdapat lima UMKM yang membutuhkan modal usaha kurang dari 10 juta rupiah; dan lima UMKM yang membutuhkan lebih dari 10 juta rupiah.

Perolehan modal usaha untuk UMKM yang membutuhkan modal usaha kurang dari 10 juta bersumber dari modal sendiri, sedangkan yang membutuhkan modal usaha lebih dari 10 juta rata-rata bersumber dari modal sendiri dan kredit Bank.

Skala prioritas pengembangan UMKM berdasarkan aspek permodalan terdapat dua UMKM yang masuk dalam kategori penting dan mendesak dan enam UMKM yang menghadapi masalah pemasaran yang penting namun tidak mendesak, serta dua UMKM masuk kategori yang mendesak namun tidak penting.

Analisis Aspek Bantuan

Dilihat dari aspek bantuan dapat dibagi menjadi: 1) bantuan modal dari pemerintah; 2) bantuan bentuk lain pemerintah; dan 3) bantuan non pemerintah.

Dilihat dari bantuan modal pemerintah, keseluruhan UMKM tidak pernah memperoleh bantuan modal dari pemerintah namun bantuan pemerintah berupa bentuk lain seperti pelatihan manajemen dan pelatihan produksi yang telah diterima dari lima UMKM sedangkan UMKM yang lain tidak memperoleh bantuan apapun.

Terdapat beberapa UMKM yang menerima bantuan dari lembaga non pemerintah seperti perusahaan berupa *corporate social responsibility* (CSR). Sementara enam UMKM telah memperoleh bantuan dari perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Bengalon berupa pelatihan dan bantuan tambahan mesin produksi serta pendampingan usaha.

Berdasarkan Aspek Pemasaran

Skala prioritas pengembangan UMKM berdasarkan aspek pemasaran terdapat dua UMKM yang masuk dalam kategori penting dan mendesak dan enam UMKM yang menghadapi masalah pemasaran yang penting namun tidak mendesak, serta dua UMKM masuk kategori yang mendesak namun tidak penting.

Analisis Aspek Promosi

Aspek promosi yang dianalisis meliputi : 1) Media yang digunakan untuk promosi; 2) Pamerandi daerah dan 3) Pameran

Nasional. Bentuk promosi yang telah dilakukan oleh UMKM di Kecamatan Bengalon adalah mengikuti pameran baik dalam lingkup lokal maupun nasional selain menggunakan berbagai media sosial untuk mempromosikan produknya.

Skala prioritas pengembangan UMKM berdasarkan aspek promosi terdapat satu UMKM yang masuk dalam kategori penting dan mendesak dan sembilan UMKM yang masuk kategori yang penting namun tidak mendesak.

Berdasarkan hasil analisis diatas permasalahan utama UMKM di Kecamatan Bengalon yaitu: 1) bidang permodalan; 2) bidang pemasaran; 3) bidang produksi; 4) bidang penunjang produksi; dan 5) bidang lainnya. Dari kelima masalah tersebut, permodalan dan pemasaran menjadi masalah utama dan dialami semua UMKM. Rata-rata produk masih dipasarkan terbatas di wilayah kecamatan, sebagian kecil di pasaran ibu kota kabupaten selain kesulitan akses untuk menjual di mini market terkenal. Persoalan teknologi sebagai pendukung proses produksi juga dialami hampir semua UMKM walaupun tidak berpengaruh kepada produktifitas UMKM untuk berproduksi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, maka bagian ini akan mengidentifikasi permasalahan bidang-bidang utama UMKM di Kecamatan Bengalon yaitu: 1) bidang permodalan; 2) bidang pemasaran; 3) bidang produksi; 4) bidang penunjang produksi; dan 5) bidang lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

Masalah UMKM Kecamatan Bengalon meliputi bidang permodalan, pemasaran, produksi dan teknologi penunjang produksi. Umumnya UMKM Kecamatan Bengalon masih membutuhkan modal, internet untuk pemasaran, akses penjualan ke mini market,

peralatan dan bahan baku. Selain masih memerlukan pembinaan seperti sosialisasi perijinan, kebersihan tempat usaha maupun pendampingan.

Strategi pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah Kecamatan Bengalon yaitu melalui bina lingkungan berupa pelatihan manajemen, pelatihan teknis produksi dan peran perusahaan untuk mendapatkan pengembangan sarana produksi serta modal. Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pengembangan UMKM juga dilakukan melalui pemberian bantuan dari lembaga non pemerintah seperti program *corporate social responsibility* (CSR) kepada enam UMKM berupa pelatihan dan bantuan tambahan mesin produksi serta pendampingan usaha.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat dikemukakan saran-saran untuk pengembangan UMKM di Kecamatan Bengalon sebagai berikut:

1. Dilakukan pengembangan produk lokal unggulan dari hulu hingga ke hilir sebagai basis usaha koperasi dan UMKM.
2. Memberikan stimulus pendanaan seperti penundaan pembayaran kredit, penjaminan modal kerja, subsidi bunga, kompensasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha.
3. Menyiapkan peraturan dan ketentuan pendukung pelaksanaan *resetting* dan perubahan mindset pembangunan ekonomi rakyat yang berisi kebijakan umum, sistem dan prosedur pelaksanaan, *reward and punishment* yang tegas dan transparan melalui Dashboard Management System.
4. Penguatan digitalisasi bagi Koperasi dan UMKM, menuju terbentuk *market place*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga dan Sudantoko, 2002. "Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Jakarta": Rineka Cipta. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2020". <https://kutimkab.bps.go.id/publication/>
- Badan Pusat Statistik. 2019. "Kecamatan Bengalon dalam Angka 2019". <https://kutimkab.bps.go.id/publication/2019>
- Bank Indonesia. 1998. SK Dir.BI No.31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998, tentang Usaha Mikro.
- Bank Indonesia. 1997. SK Dir BI No.30/45/DIR/UK tgl 5 Januari 1997. tentang Usaha Menengah.
- Darwanto. 2013. "Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi dan Kreativitas)". Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.20.No(2).Hal:1 42-149
- Dinas Koperasi dan UKM 2018. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018". Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur. <https://www.kutaitimurkab.go.id/files/upload/>
- Iwan Ridwan Zaelani. 2019. "Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan dan Peluang Pengembangan Iptek". Jurnal Transborders | Vol. 3 No. 1 (Desember 2019) | P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta
- Neny Susanti, 2018. "Pengembangan *Community Based Economic Development* Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 (Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)". Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. ISSN 2303 - 341X. Volume 6, Nomor 3, September – Desember 2018.
- Pemerintah RI. 1995. Undang-undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil.
- Pemerintah RI. 1999. Undang-undang No.10/1999 tentang Usaha Menengah
- Primiana, Ina. 2009. "Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri". Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Putra, Gede Surya Pratama., dan Mustika, Made Dwi Setyadi. 2014. "Efektivitas Program Jamkrida Dan Dampak Terhadap Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM". E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.3. No. (12) Hal:549- 557.
- Saleh, Choirul. 2013. Bahan DIKLAT Strategic Planning For Development.
- Saputro.J.W., Handayani, Putu Wuri., Hidayanto, Achmad Nizar., dan Budi, Indra. 2010. "Peta Rencana (ROADMAP) Riset Enterprise Resource Planning (ERP) Dengan Fokus Riset Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UMK) Di Indonesia". Journal of Information Systems. Vol.6. No. (2). Hal:140-145.
- Sholhuddin, Muhammad. 2013. "Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya Mengembangkan UMKM". Proceeding Seminar Nasional Dan *Call For Paper* Sancall. Surakarta. Hal: 496-500.
- Supriyanto. 2006. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu upaya Penanggulangan Kemiskinan". Jurnal

- Ekonomi & Pendidikan, Volume 3
Nomor 1, April 200
- Usman Sunyoto. 2004. "Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat",
Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wilantara, Rio F dan Susilawati. 2016.
"Strategi dan Kebijakan Pengembangan
UMKM : (Upaya Meningkatkan Daya
Saing UMKM Nasional di Era
MEA)". PT. Refika Aditama. Cetakan
kesatu, Juni 2016. Bandung.